

## Audit Proyek Pengerukan Sungai Musi!



<http://jurnalmetro.com/>

### Palembang, BP

Sebanyak 30 orang yang mengaku dari Koalisi Masyarakat Mahasiswa Independent Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Senin (14/9).

Koordinator aksi Eddi Ginting didampingi koordinator lapangan R Hidayat mengatakan, pihaknya meminta BPK RI Perwakilan Sumsel melakukan audit<sup>1</sup> terhadap proyek pengerukan Sungai Musi tahun anggaran 2013 dan 2014 dengan anggaran Rp48 miliar dan 2015 sebesar Rp68 miliar.

“Kami berharap BPK memanggil pihak pengelola yakni Khasabandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Boombaru Palembang dan melakukan audit terhadap proyek tersebut akan dijadikan data tambahan untuk dilaporkan” katanya.

Pihaknya juga mendukung upaya pihak penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanggapi dugaan permasalahan proyek pengerukan sungai Musi ini.

Pihaknya bahkan meminta agar semua pihak terkait proyek ini dipanggil dan diperiksa. “Kami akan terus memantau proyek tersebut akan terus melakukan aksi dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan secara maksimal dan sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Pihaknya menilai proyek pengerukan Sungai Musi rentan terjadinya *mark-up* dalam pelaksanaannya. Sementara itu Kasubag Humas BPK Perwakilan Sumsel yang menerima pendemo, Atik Priyarna mengaku, sudah menerima laporan para pendemo. “Maaf pimpinan sedang keluar namun laporan adik-adik semua akan segera ditindaklanjuti,” katanya.

### Sumber Berita:

1. Berita Pagi, Selasa, 15 September 2015 hal.14
2. Palembang Pos, *Desak Transparansi Proyek Pengerukan*, Selasa, 15 September 2015

---

<sup>1</sup> Audit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala (<http://kbbi.web.id/audit>). Pemeriksaan adalah yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)